

PERAN DANA ZAKAT DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

Nova Rini

nvrin207@yahoo.com

STIE Muhammadiyah Jakarta

Nurul Huda

Universitas Yarsi

Yosi Mardoni

Purnama Putra

Program Pascasarjana, Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia

ABSTRACT

This research attempts to examine the role of zakat in reducing income inequality and poverty, by taking a case study in Bogor. Two zakat institutions, Baytul Maal Bogor and Baytul Ikhtiar have been selected. A number of well-known inequality and poverty measures have utilized including Lorenz Curve, Gini coefficient, Atkinson index, headcount ratio, poverty gap index, income gap index, sen index and FGT index. After analyzing 200 household as the respondent, this study found zakat has increased monthly income of the household 11,48%. In general, the presence of zakat helps lower the income inequality an average of 0,3% points. The findings suggest that the presence of zakat has make better the income loss of the respondent an average of 25,7% points. The existence of zakat is able to decrease the poverty incidence an average of 44% points. The gap of poverty can be reduced as the poverty gap show can be reductions of 27%. The depth of poverty can be reduced as the income gap show the reductions 18,8% points. Similarly, the severity of poverty can also be lower as evidenced from 18% points increase in the Sen index and 10% points increase in the FGT index.

Keywords: income, inequality, poverty, zakat.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, dengan studi kasus di Bogor. Dua institusi zakat yang dipilih yaitu Baytul Maal Bogor dan Baytul Ikhtiar. Penghitungan ketimpangan dan kemiskinan yang digunakan adalah *Lorenz Curve*, *Gini Coefficient*, *Atkinson Index*, *Headcount Ratio*, *Poverty Gap Index*, *Income Gap Index*, *Sen Index* dan *FGT Index*. Setelah menganalisis 200 rumah tangga sebagai responden di Bogor, Jawa Barat, studi ini menemukan bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan bulanan rumah tangga sebesar 11,48%. Secara umum, keberadaan zakat membantu menurunkan ketimpangan pendapatan rata-rata 0,3 poin persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran zakat membuat lebih baik *income loss* responden rata-rata 25,7%. Kemudian, zakat juga mampu mengurangi kemiskinan sebesar rata-rata 44 persen. Ketimpangan kemiskinan dapat berkurang sebesar 27%. Selanjutnya kedalaman kemiskinan dapat dikurangi sebagai kesenjangan pendapatan menunjukkan pengurangan 18,8 poin persentase. Demikian pula, *severity* kemiskinan juga dapat lebih rendah terbukti dari 18 poin persentase kenaikan indeks Sen dan 10 poin persentase kenaikan indeks FGT.

Kata kunci: ketimpangan, pendapatan, kemiskinan, zakat.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang selalu dihadapi setiap bangsa dan tidak pernah ada penyelesaiannya khususnya bagi negara sedang

berkembang adalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Ibnu Hazm (994-1066M) seperti dikutip oleh Sadeq dan Ghazali (1992) mengartikan bahwa kemiski-

nan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Ibnu Hazm juga merincikan bahwa ada empat bentuk kebutuhan yang membentuk esensi standar dasar hidup bagi seorang manusia, yaitu makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa negara dan orang kaya harus bertanggung jawab untuk memastikan kepuasan dari kebutuhan dasar tersebut.

Bank Dunia menetapkan ukuran kemiskinan melalui ukuran dollar, yaitu US\$ 1 perorang perhari. Karenanya, bila suatu individu hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kurang dari satu dollar perhari dapat dikatakan sebagai di bawah garis kemiskinan. Bank Dunia melontarkan pemikiran pengukuran kemiskinan melalui metode Penilaian Kemiskinan secara Partisipatif (*Participatory Poverty Assessment/PPA*) oleh komunitas miskin itu sendiri untuk menentukan dimensi-dimensi kemiskinan pada komunitas. *Participatory Poverty Assessment* digunakan untuk memahami kemiskinan dari sudut pandang kaum miskin dengan memfokuskan pada realita, kebutuhan, dan prioritasnya. *Participatory Poverty Assessment* mengidentifikasi bahwa kemiskinan juga ditekankan pada aspek-aspek lain seperti kerentanan, keterisolasian secara fisik dan sosial, kurangnya rasa aman dan harga diri, dan ketidakberdayaan (Robb, 2002; Pandji, 2001).

Kuznets (1955) dalam Kuncoro (1997) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi (Ismoro, 1995 yang dikutip oleh Rahayu *et al.*, 2000).

Satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan tersebut adalah dengan menghimpun dana

zakat dan menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran. Secara empiris, kesejahteraan sebuah negara karena zakat terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. meskipun beliau hanya memerintah selama 22 bulan karena meninggal dunia, negara menjadi sangat makmur, yaitu dengan pemerintahan yang bersih dan jujur dan zakat yang ditangani dengan baik, hingga kala itu negara yang cukup luas hampir sepertiga dunia tidak ada yang berhak menerima zakat karena semua penduduk muslim sudah menjadi *muzakki*, itulah pertama kali ada istilah zakat ditransfer ke negeri lain karena tidak ada lagi yang patut disantuni. Zakat dapat menumbuhkan etos kerja. Dengan membayar zakat seseorang akan bekerja dengan baik. Sehingga gerakan sadar zakat pada dasarnya adalah gerakan menciptakan etos kerja yang baik yang memberi kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi semua.

Kahf (1995) menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan dalam Islam cenderung berperan sebagai sistem distribusi harta yang *egaliter* sehingga harta akan selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan rakyat, karena akumulasi harta di tangan seseorang atau suatu kelompok saja sangat ditentang oleh Al-Qur'an.

Implementasi zakat di negara-negara Muslim mengarah pada dua bentuk yang berbeda. *Pertama*, negara-negara Muslim dengan sistem wajib zakat (*obligatory basis*), sistem seperti ini diterapkan di Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya dan Malaysia. *Kedua*, negara-negara muslim dengan sistem zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masyarakat (*voluntary basis*). Sistem ini antara lain diterapkan antara lain di Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, Mesir dan Indonesia (Indonesia *Magnificence Zakat*, 2010).

Riset Patmawati (2006) tentang "*Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor*" menunjukkan bahwa zakat telah berhasil

mengurangi tingkat kemiskinan dalam berbagai aspeknya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara mandiri. Secara nasional jumlah dana yang dihimpun oleh BAZNAS, BAZDA dan LAZ terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada tabel 1.

Masalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan yang dapat diselesaikan dengan penyaluran zakat merupakan suatu kondisi tidak meratanya distribusi pendapatan dan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Permasalahan tersebut jika tidak ditanggulangi akan memperparah keadaan dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Tingkat kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan oleh nilai Rasio Gini di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 1999 sampai 2007. Baru tahun 2008 sampai 2010 mengalami tren penurunan. Untuk tahun 2010, rasio gini menunjukkan angka 0,331. Jumlah penduduk miskin berfluktuasi dari tahun ketahunnya. Meskipun secara umum 5 tahun terakhir dari tahun 2007 sampai 2011 menunjukkan tren

penurunan. Berdasarkan data BPS (2012) untuk tahun 2011 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 10,95 juta jiwa atau sekitar 9% dari total penduduk Indonesia, sedangkan untuk wilayah pedesaan relatif lebih besar yakni sebesar 18,94 juta jiwa atau sekitar 15,59% dari total penduduk Indonesia. Secara keseluruhan untuk wilayah kota dan desa mengalami penurunan menjadi 12,36% tahun 2011 dibanding tahun 2010 sebesar 13,33%.

Riset mengenai peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan dilakukan oleh Beik (2010), Hartoyo dan Purnamasari (2010). Beik (2010) melakukan penelitian mengenai peran zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di wilayah DKI Jakarta. Sementara Hartoyo dan Purnamasari (2010) melakukan penelitian di wilayah Garut.

Penelitian Beik (2010), menunjukkan bahwa dana zakat yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-rata 9,82% dan jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi 16,80%. Penelitian Hartoyo dan Purnamasari (2010) juga menunjukkan pendayagunaan ZIS mampu meningkatkan pendapatan perkapita mustahik sebesar 3,70% dan jumlah orang miskin mengalami penurunan sebesar 21,40%.

Tabel 1
Pengumpulan Dana Zakat Nasional 2002-2011

Tahun	Penerimaan Zakat (Juta Rupiah)	Tahun	Penerimaan Zakat (Juta Rupiah)
2002	80,368	2007	450,000
2003	99,709	2008	920,000
2004	167,588	2009	1,200,000
2005	271,103	2010	1,500,000
2006	413,915	2011	1,800,000

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Riset-riset yang sudah dilakukan di Indonesia mengenai peran dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan tersebut, sepengetahuan

peneliti belum ada yang melakukan penelitian di daerah Bogor. Secara geografis, Kabupaten Bogor merupakan kota satelit bagi Kota Jakarta atau berada dalam

lingkungan wilayah Jabotabek. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tangerang (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi di utara, Kabupaten Karawang di Timur, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak (Banten) di barat. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor hasil Sensus Penduduk 2010 mencapai 4.763.209 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.446.251 jiwa dan penduduk perempuan 2.316.958 jiwa, sedangkan sex rasio 105. Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang paling banyak penduduknya dibanding dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, yaitu 43.021.826 jiwa, sedangkan kabupaten/kota dengan penduduk terkecil adalah Kota Banjar yaitu 175.165 jiwa.

Data BPS (2009) Jumlah keluarga miskin Kabupaten Bogor pada tahun 2009 adalah sebanyak 446.000 jiwa, jumlah ini tidak mengalami peningkatan tahun 2008 sampai 2009. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin kembali berhasil diturunkan dari 10,81% pada 2009 menjadi 8,97% pada 2010 atau sebanyak 427.300 jiwa. Walaupun ada penurunan, namun angka kemiskinan di Kabupaten Bogor tersebut termasuk cukup besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu berdasarkan survei Dhompot Dhuafa (2010), Propinsi Jawa Barat sebagian besar daerah kabupaten/kota ini memiliki potensi wilayah yang sedang dan tinggi. Sedangkan kondisi mustahik dan muzaki di wilayah ini bervariasi. Kota Tasikmalaya dan Sukabumi memiliki rasio mustahik dan muzakki yang tergolong sedang. Sementara itu, Kota Depok, kota Bogor, Bandung dan Bekasi memiliki kombinasi mustahik sedang dan *muzakki* tinggi. Ini merupakan potensi yang baik bagi wilayah-wilayah tersebut untuk meningkatkan keadaannya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bulan Maret 2010 mencatat adanya 31,02 Juta penduduk miskin dari 228 juta jiwa penduduk Indonesia atau kurang lebih 14,15%, pada

sisi lain rasio Gini pada 2010 tercatat 0,331. Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari Rp 173.281/kapita/bulan tahun 2008 meningkat menjadi Rp 197.319/kapita/bulan tahun 2009. Angka ini masih tergolong angka yang sangat tinggi tentunya. Berdasarkan kondisi tersebut terlihat adanya ketidakefektifan dalam pengumpulan zakat, hal ini tentunya berdampak pada peranan zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, sehingga dengan kondisi tersebut, maka dilakukan riset mengenai peran dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di wilayah Bogor. Ada 5 pertanyaan, yaitu: (1) apakah distribusi zakat pada rumah tangga mustahik berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan sampel penelitian Kabupaten Bogor?; (2) apakah distribusi zakat pada rumah tangga mustahik berdampak pada penurunan jumlah mustahik yang hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan pada sampel penelitian Kabupaten Bogor?; (3) apakah distribusi zakat pada rumah tangga mustahik berdampak pada penurunan tingkat kesenjangan kemiskinan mustahik pada sampel penelitian di Kabupaten Bogor?; (4) apakah distribusi zakat pada rumah tangga mustahik berdampak pada penurunan tingkat kedalaman kemiskinan mustahik pada sampel penelitian Kabupaten Bogor? dan (5) apakah distribusi zakat pada rumah tangga mustahik berdampak pada penurunan tingkat keparahan kemiskinan mustahik pada sampel penelitian di Kabupaten Bogor?

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisa apakah distribusi zakat pada rumah tangga mustahik berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan sampel penelitian Kabupaten Bogor; (2) menganalisa apakah distribusi zakat pada rumah tangga mustahik berdampak pada penurunan jumlah mustahik yang hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan pada sampel penelitian di Kabupaten Bogor; (3) menge-

tahui distribusi zakat pada rumah tangga mustahik berdampak pada penurunan tingkat kesenjangan kemiskinan mustahik pada sampel penelitian di Kabupaten Bogor; (4) menganalisa apakah distribusi zakat pada rumah tangga mustahik berdampak pada penurunan tingkat kedalaman kemiskinan mustahik pada sampel penelitian Kabupaten Bogor; dan (5) menganalisa apakah distribusi zakat pada rumah tangga mustahik berdampak pada penurunan tingkat keparahan kemiskinan mustahik pada sampel penelitian Kabupaten Bogor.

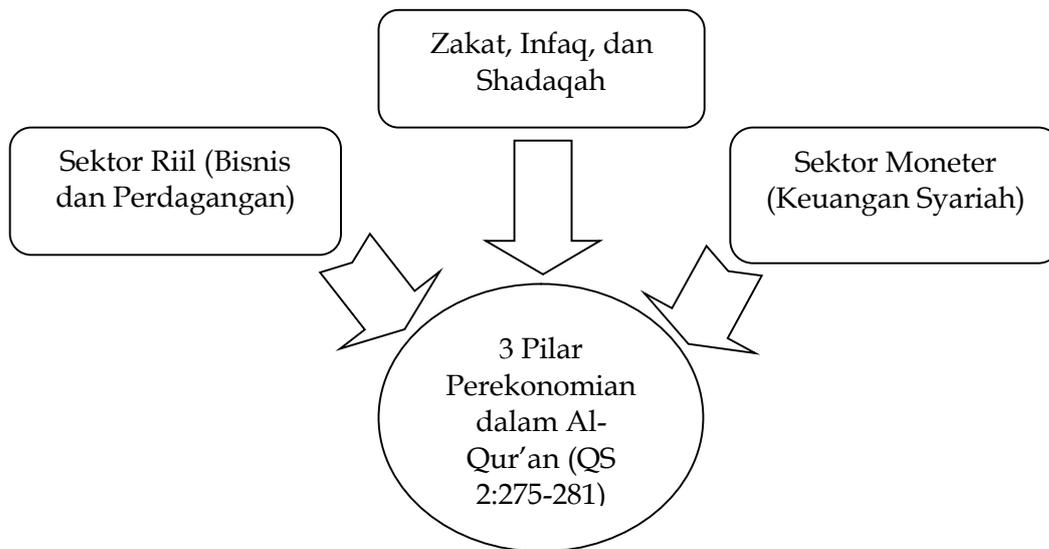
TINJAUAN TEORETIS

Riset Ishaq (2003) dalam IMZ (2011), menyatakan salah satu penyebab utama kegagalan lembaga pembangunan Internasional, termasuk kegagalan sejumlah negara berkembang dalam memerangi kemis-

kinan karena mengabaikan nilai-nilai religius dan budaya lokal sebagai komunitas bangsa, karena itu direkomendasikan penggunaan instrumen pengentasan kemiskinan yang berbasis agama dan budaya lokal.

Berdasarkan riset Ishaq tersebut, maka dalam konteks Indonesia, zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dapat menjamin instrumen pengentasan kemiskinan yang tepat dan efektif. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa integritas zakat dalam kebijakan ekonomi Nasional sangat diperlukan. Berdasarkan QS 2: 275-281, ada 3 sektor penting dalam perekonomian menurut Al-Qur'an, pada: (1) sektor riil (jual beli) yaitu bisnis dan perdagangan, (2), sektor keuangan dan moneter dan (3) zakat, infak dan shadaqah (ZIS).



Gambar 1
Tiga Pilar Perekonomian dalam Al-Qur'an

Sumber: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2011

Disertasi Doktor yang ditulis oleh Patmawati (2006) tentang *"Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor"* menunjukkan bahwa zakat telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dalam berbagai aspeknya. Jika dilihat dari segi *poverty incidence*, zakat telah menyebabkan tingkat kemiskinan di Sela-

ngor berkurang dari 62% menjadi 47% dari total penduduk fakir dan miskin yang menjadi mustahik zakat. Penurunan lebih signifikan terjadi di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Kecenderungan yang sama terjadi pada aspek keparahan kemiskinan (*severity of poverty*) dimana distribusi pendapatan dimasukkan sebagai salah satu

pertimbangan. Sen dan FGT *Index* yang semakin menurun membuktikan hasil yang terakhir ini. Selain dampak menyeluruh terhadap kemiskinan di atas, pemetaan lebih rinci juga menunjukkan hasil yang menarik. Walaupun tingkat kemiskinan penduduk di perkotaan lebih kecil, tetapi mereka mengalami kedalaman kemiskinan yang lebih besar. Artinya gap antara tingkat pendapatan dengan garis kemiskinan di pedesaan lebih kecil dibandingkan dengan di perkotaan. Dengan garis kemiskinan yang sama, hal ini berarti rata-rata tingkat pendapatan fakir miskin di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendapatan fakir miskin di perkotaan. Namun dari segi tingkat keparahan kemiskinan, penduduk pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perkotaan yang menyiratkan distribusi pendapatan di kalangan penduduk miskin di perkotaan lebih merata.

Penelitian Beik (2010), dana zakat yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-rata 9,82%, sedangkan proporsi zakat sendiri terhadap total pendapatan rumah tangga mustahik adalah 8,94%. Kontribusi zakat terhadap pendapatan yang paling besar terjadi di Jakarta Barat (11%) dan Jakarta Selatan (10,16%), sedangkan yang terendah adalah di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu (5,49%). Ini menunjukkan bahwa secara umum, zakat mampu memperbaiki taraf kehidupan mustahik. Selain itu jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi 16,80%. Ini membuktikan bahwa ketika zakat dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan profesional, maka implikasi terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin penerima zakat dapat direalisasikan, meskipun angkanya kurang dari seperlimanya. Sementara itu, tingkat kedalaman kemiskinan mustahik juga dapat dikurangi. Zakat mampu mengurangi jarak pendapatan rata-rata rumah tangga mustahik terhadap garis kemiskinan dari Rp 475.858,78 menjadi Rp 409.726,40, atau sebesar 13,90%. Demikian pula halnya dengan

rasio kesenjangan pendapatan (I) yang dapat dikurangi sebesar 13,72%. Hasil yang sama juga diperlihatkan oleh indeks Sen dan indeks FGT pasca distribusi zakat. Tingkat keparahan kemiskinan rumah tangga miskin penerima zakat dapat dikurangi.

Beik (2010) menyebutkan bahwa peran zakat terhadap kemiskinan dan ketimpangan yang dilihat berdasarkan variabel jenis kelamin, usia kepala rumah tangga, status perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga, daerah, tipe program zakat, dan institusi zakat mampu memberikan efek yang positif, baik terhadap keberadaan jumlah orang miskin, tingkat kesenjangan kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Pengaruh zakat jika dilihat dari variabel-variabel tersebut, maka pada variabel tingkat pendidikan rumah tangga dan tipe program zakat yang memberikan pengaruh paling baik terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

Penelitian Hartoyo dan Purnamasari (2010) untuk daerah Garut program pendayagunaan ZIS mampu meningkatkan pendapatan perkapita mustahik sebesar 3,70%. Kecilnya persentase tersebut disebabkan oleh masih rendahnya angka penghimpunan ZIS yang ada, sedangkan nilai *headcount ratio* (H), turun dari 0,68 menjadi 0,56. Ini berarti jumlah orang miskin mengalami penurunan sebesar 21,40% setelah adanya pendayagunaan zakat. Sementara itu, baik *poverty gap* maupun *income gap* menunjukkan penurunan sebesar 7,52%. Ini membuktikan bahwa zakat mampu mempersempit jarak antara pendapatan rata-rata perkapita mustahik terhadap garis kemiskinan. Dengan kata lain, tingkat kedalaman kemiskinan dapat diturunkan. Adapun untuk tingkat keparahan kemiskinan, survei membuktikan adanya pengurangan nilai indeks Sen dan indeks FGT, masing-masing sebesar 29,90% dan 37,30%. Ini juga berarti bahwa pendayagunaan ZIS, mampu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata di antara orang miskin.

Penelitian Indonesia *Magnificence of Zakat/IMZ* (2010) memberikan hasil dana zakat yang dikelola lembaga amil zakat mampu mengurangi kemiskinan mustahik, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan. Angka kemiskinan rumah tangga penerima zakat secara empirik dapat dikurangi sebesar 10,79%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika zakat dikelola melalui lembaga amil yang amanah, maka implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan sangat signifikan. Namun demikian perlu diperhatikan sejumlah karakteristik rumah tangga yang memiliki kerawanan terhadap kemiskinan yang lebih tinggi.

Beik (2010), menyatakan bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki tiga dimensi pokok yaitu: Pertama, dimensi spiritual personal yaitu zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah sekaligus penyucian jiwa dari segala penyakit rohani seperti bakhil dan tidak peduli sesama (QS 9:103). Kedua, dimensi sosial yaitu menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat, dimana zakat dapat dijadikan media untuk memperkuat ketahanan nasional dan meminimalisasi potensi disintegrasi bangsa. Ketiga, dimensi ekonomi yang tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan (QS 30:39) dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian (QS 51:19).

Chapra (2006) menegaskan peringatan Al-Qur'an yang melarang pemusatan kekayaan pada segelintir pihak (QS 59:7), tidak akan berjalan dengan baik tanpa pelaksanaan sistem zakat yang terintegrasi dalam sistem ekonomi sebuah masyarakat. Karena itu Chapra menyatakan bahwa pemerintah atau negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam merealisasikan proses integrasi zakat ini, meski peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan.

Pramanik (1993) berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam meredistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro eko-

nomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi, investasi, dan untuk bekerja. Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat.

Mannan (2000) mengatakan bahwa zakat merupakan alat untuk memproduktifkan aset-aset *idle* dalam perekonomian. Kewajiban zakat terhadap emas yang tidak dipakai menurut Mannan, adalah contoh betapa pedulinya Islam terhadap produktivitas aset-aset yang ada. Jika aset-aset tersebut dibiarkan tidak produktif, maka implikasinya akan buruk terhadap perekonomian.

Ali (2006) menerangkan bahwa tujuan zakat adalah (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil dan mustahik lainnya; (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat; (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁: ada perbedaan tingkat pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah zakat,
 H₂: ada perbedaan tingkat kemiskinan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah zakat.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu rumah tangga mustahik yang menerima dana zakat dari Lembaga Zakat Baytul Maal

dan Baytul Ikhtiar Bogor, sedangkan sampel penelitian ini yaitu rumah tangga *mustahik* yang mukim pada wilayah Kabupaten Bogor yang mendapatkan dana zakat dari Baytul Maal dan Baytul Ikhtiar Bogor sebanyak 200 rumah tangga.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2012 sampai Juli 2012, sedangkan tempat penelitian dilaksanakan di wilayah Bogor dengan mengambil empat kecamatan, yaitu Bogor Utara, Cibungbulang, Tamansari dan Ciomas.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini menguji dua set/perangkat data. Perangkat pertama data berisi data pendapatan rumah tangga *pra*-zakat dan perangkat kedua berisi data pendapatan rumah tangga *pasca*-zakat. Menurut Shirazi (1994) dan Patmawati (2006), jumlah transfer dana zakat dikurangi dari pendapatan rumah tangga untuk mendapatkan set pertama distribusi pendapatan.

Adapun standar garis kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar garis kemiskinan (GK)¹ Kabupaten Bogor yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk tahun 2009, garis kemiskinan ini nilainya Rp 197.319/kapita/bulan. Terkait dengan peranan distribusi

¹Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

zakat pada rumah tangga *mustahik* terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, maka langkah yang dilakukan yaitu dengan menghitung:

1. Kurva *Lorenz* dan koefisien Gini sebagai ukuran positif dari ketimpangan pendapatan, rumus koefisien Gini, yang di hitung dari daerah antara kurva *Lorenz* dan garis diagonal.

$$G = 1 - \frac{\sum(ab)}{\sum(bd+ac)} \quad (1)$$

dimana:

G = koefisien Gini (bervariasi dari 0 ke 1)

ab = nilai berdasarkan pembagian populasi (karena penelitian ini membagi populasi ke dalam kelompok desil, nilainya sebesar 10%)

bd = persentase dari pendapatan yang diterima oleh penduduk

ac = persentase penduduk

Untuk mengecek hasil, metode perkiraan penghitungan koefisien Gini juga akan digunakan. Hal ini didasarkan pada ukuran distribusi pendapatan, yang juga merupakan dasar untuk menurunkan kurva *Lorenz*. Metode ini sebagai berikut:

$$G = \frac{\sum_{t=1}^T (Pt Q(t+1)) - \sum_{t=1}^T P(t+1)Qt}{\sum_{t=1}^T P(t+1)Qt} \quad (2)$$

dimana:

G = koefisien *Gini* (bervariasi dari 0 ke 1)

Pt = bagian kumulatif dari pendapatan dalam kelompok

Qt = bagian kumulatif pendapatan dalam kelompok ke-/untuk t = 1, ..., T

2. Indeks *Atkinson* sebagai ukuran normatif dari ketimpangan pendapatan, interpretasi indeks *Atkinson* didasarkan pada nilai-nilai *pra* dan *pasca* zakat. Jika nilai Indeks *Atkinson pasca*-zakat lebih kecil dari nilai Indeks *Atkinson pra*-zakat, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat dapat mengurangi hilangnya kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya.

nya. Rumus indeks *Atkinson* sebagai berikut :

$$I = 1 - \frac{Y_{EDE}}{\mu} \text{ Dimana } Y_{EDE} = \frac{m}{(1-Gp)} \quad (3)$$

dimana:

I = *Atkinson* Indeks

Y_{EDE} = Tingkat kesetaraan pendapatan

μ = rata-rata distribusi pendapatan penduduk

m = rata-rata pendapatan masyarakat miskin

Gp = koefisien *Ginipoor*²

Sedangkan terkait dengan peranan distribusi zakat pada rumah tangga mustahik terhadap pengurangan tingkat kemiskinan maka langkah yang dilakukan yaitu dengan menghitung:

3. *Headcount Index* yaitu yang Indeks ini hanya menghitung jumlah orang miskin dan memvalidasi persentase dari total jumlah penduduk, yang termasuk ke dalam kategori miskin. Rumus ukuran ini adalah sebagai berikut :

$$H = \frac{q}{n} \quad (4)$$

dimana:

q = jumlah individu yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan

n = total jumlah penduduk

4. *Indeks poverty gap* ini adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur berapa jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan. Adapun kelompok bukan miskin yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dianggap memiliki indeks *poverty gap* sama dengan nol.

²Rumus koefisien Gini bagi masyarakat miskin (Gp) adalah sebagai berikut:

$$Gp = \left[\frac{q+1}{q} \right] - \left[\frac{2}{q2m} \sum_{i=1}^q (q+1-i)y_i \right]$$

dimana: q = jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan; m=pendapatan rata-rata miskin, Y = pendapatan individu

$$P = \sum_{i=1}^q givi(z, y) \quad (5)$$

dimana:

$g_i = z-y_i$, adalah selisih pendapatan individu i dengan garis kemiskinan.

$v_i(z, y)$ adalah bobot pendapatan individu pada distribusi pendapatan y yn

z = garis kemiskinan

y_i = pendapatan individu i, $i = 1, 2, \dots, q$

5. *Income Gap Index* yaitu Rasio kesenjangan-pendapatan diusulkan oleh Sen untuk menormalkan kesenjangan kemiskinan keseluruhan populasi menjadi kesenjangan kemiskinan rata-rata Individu (per orang atau per keluarga). Hal ini karena kesenjangan kemiskinan tidak menyentuh isu jumlah orang yang memiliki kesenjangan ini. Rumus dari *Income Gap Index* adalah sebagai berikut:

$$I = \sum_{i \in S(z)} \frac{g_i}{qz} \quad (6)$$

dimana:

I = *Index Income Gap*

$g_i = z-y_i$, selisih pendapatan individu i dengan garis kemiskinan

z = garis kemiskinan

y_i = pendapatan individu i

q = jumlah orang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan.

6. *Sen Index*, rumus ukuran ini sebagai berikut :

$$P2 = H[1 + (1 - I)Gp] \quad (7)$$

dimana :

$H = \frac{q}{n}$, *head count ratio*

$I = \sum_{i \in S(z)} \frac{g_i}{qz}$, *Income Gap Ratio*

Gp = Koefisien gini untuk kelompok miskin

Jika tidak ada seorangpun yang hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan, maka nilai indeks Sen ini akan sama dengan nol. Dalam kon-

teks pendayagunaan zakat, jika nilai indeks ini mengalami penurunan, maka artinya distribusi zakat memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat keparahan kemiskinan, demikian sebaliknya.

7. *Foster Greer Thorbecke Index* (FGT), formulasi indeks ini sebagai berikut :

$$P_{(y,z)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{g^i}{z} - 1 \right)$$

dimana:

g_i = $z - y_i$, selisih pendapatan individu i dengan garis kemiskinan

z = garis kemiskinan

q = jumlah orang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan

α = parameter yang mengambil nilai yang lebih besar dari atau sama dengan nol ($\alpha \geq 0$)

Nilai α memiliki pengaruh yang sangat penting. Jika $\alpha = 0$ maka indeks FGT ini akan sama dengan *headcount index*. Jika $\alpha = 1$ maka nilai FGT akan sama dengan indeks *poverty gap*. Penelitian ini menggunakan $\alpha = 2$, dimana nilai tersebut meningkatkan

sensitivitas indeks FGT terhadap distribusi pendapatan dikalangan kelompok miskin.

Interprestasi indeks ini sangat tergantung pada nilainya. Jika program pendistribusian dan pendayagunaan zakat ini mampu menurunkan nilai indeks FGT, maka distribusi zakat dapat dianggap memiliki implikasi yang positif terhadap penurunan tingkat keparahan kemiskinan, demikian sebaliknya.

Sementara untuk uji hipotesis, penelitian ini menggunakan uji beda *t test*. Uji beda *t test*, dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Analisis uji beda *t-test* menggunakan *software SPSS*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Demografi Responden

Profil responden berdasarkan pada karakteristik demografi kepala rumah tangga. Dalam karakteristik ini mencakup jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga, jumlah anggota keluarga yang tidak bekerja, jumlah anggota keluarga yang bekerja dan daerah tempat tinggal responden.

Tabel 2
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Kepala Keluarga

Karakteristik Demografi	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	177	88,5
Perempuan	23	11,5
	(200)	(100)
Usia		
20-<30	19	9,5
30-<40	55	27,5
40-<50	49	24,5
≥50 tahun	77	38,5
	(200)	(100)

Sumber: Kuesioner, data diolah

Jenis kelamin kepala keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari

hasil penelitian ini diketahui bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga paling dominan, hal ini terlihat pada data dimana

88,5% terdiri dari laki-laki dan 11,5% terdiri dari perempuan. Hal ini tentunya sudah menjadi sebuah kewajaran karena laki-laki secara fitrah memang menjadi pemimpin atas perempuan, dan laki-laki juga yang memiliki tanggung jawab dan beban yang lebih berat dibandingkan perempuan.

Usia responden yaitu kepala keluarga yang menerima zakat kebanyakan berusia lebih dari 50 tahun sebesar 38,5%. Kepala keluarga yang berusia antara 30 tahun sampai kurang dari 40 tahun adalah sebesar 27,5%. Sementara yang berusia antara 40 tahun sampai kurang 50 tahun hanya sebesar 24,5%. Kepala keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini yang menerima zakat berusia antara 20 tahun sampai kurang dari 30 tahun hanya sebesar 9,5%. Dari kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian zakat pada usia yang tidak produktif jauh lebih besar daripada yang berusia produktif. Seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Status perkawinan dari 200 kepala keluarga yang menerima zakat didominasi oleh kepala keluarga dengan status pernikahan telah menikah, yaitu sebesar 88,5%. Sementara sebesar 11,5% memiliki status janda/duda. Selanjutnya profil responden

berdasarkan jumlah anggota keluarga yang dimiliki responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga yang terdiri antara 2 sampai 6 orang lebih dalam satu keluarga. Sementara jumlah anggota keluarga terbesar adalah pada interval 3-4 orang perkeluarga, yaitu sebesar 42,5%. Kemudian pada *interval* 5-6 orang perkeluarga sebesar 35% dan 12% untuk *interval* lebih dari 6 orang. Sedangkan jumlah anggota keluarga paling rendah adalah pada *interval* 1-2 orang perkeluarga yaitu sebesar 10,5%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.

Profil responden berikutnya adalah berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Dari hasil penelitian di lapangan, ada tiga kelompok tingkat pendidikan dari kepala rumah tangga penerima zakat. Persentase kepala keluarga dengan tingkat pendidikan SD adalah yang terbesar dari total penerima zakat yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebesar 65,5%. Kemudian diikuti dengan kepala keluarga pada tingkat pendidikan SMP sebesar 13,5% dan responden yang tidak sekolah sebesar 15%. Hanya sebesar 6% responden yang memiliki tingkat pendidikan sampai tingkat SMA.

Tabel 3
Profil Responden Berdasarkan Status Perkawinan dan Jumlah Anggota Keluarga

Karakteristik Demografi	Frekuensi	Persentase
Status Perkawinan		
- Menikah	177	88,5
- Janda/duda	23	11,5
	(200)	(100)
Jumlah Anggota Keluarga		
- 1-2	21	10,5
- 3-4	85	42,5
- 5-6	70	35
- 6 keatas	24	12
	(200)	(100)

Sumber: Kuesioner, data diolah

Dalam penelitian yang dilakukan, jenis pekerjaan responden dikelompokkan dalam enam jenis kategori. Kategori jenis pekerja-

an yang paling banyak dimiliki kepala keluarga penerima zakat yang sebagai responden dalam penelitian ini adalah jenis

pekerjaan petani/peternak yaitu sebesar 27,5%. Kemudian jenis kategori pekerjaan penerima zakat berikutnya adalah pekerja bangunan/pabrik sekitar 25%. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebesar 22% responden dalam penelitian ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Sebesar 21%

adalah penerima zakat dengan jenis pekerjaan pedagang/wiraswasta. Kemudian jenis kepala keluarga dengan jenis pekerjaan supir sebesar 6%, dan selain jenis pekerjaan diatas sebesar 18,5%. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan

Karakteristik Demografi	Frekuensi	Persentase
Tingkat Pendidikan		
- Tidak Sekolah	30	15
- SD	131	65,5
- SMP	27	13,5
- SMA	12	6
	(200)	(100)
Jenis Pekerjaan		
- Ibu Rumah Tangga	4	22
- Pedagang/wiraswasta	42	21
- Petani/Peternak	55	27,5
- Pekerja bangunan/pabrik	50	25
- Supir	12	6
- Lainnya	37	18,5
	(200)	(100)

Sumber: Kuesioner, data diolah

Tabel 5
Profil Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Yang Bekerja dan Tidak Bekerja

Karakteristik Demografi	Frekuensi	Persentase
Jumlah Anggota Keluarga Yang Bekerja		
- 1-2 Orang	109	54,77
- 3-4 Orang	24	12,06
- 5-6 Orang	7	3,52
- Lebih dari 6 Orang	7	3,52
- Tidak ada	52	26,13
	(200)	(100)
Jumlah Anggota Keluarga Yang Tidak Bekerja		
- 1-2 Orang	91	45,5
- 3-4 Orang	80	40
- 5-6 Orang	15	7,5
- Lebih dari 6 Orang	7	3,5
- Tidak ada	7	3,5
	(200)	(100)

Sumber: Kuesioner, data diolah

Jumlah anggota keluarga yang bekerja dilihat dari responden ini adalah anggota

keluarga yang bekerja selain kepala keluarga, sedangkan jumlah anggota keluarga

yang tidak bekerja adalah yang menjadi tanggungan dari kepala keluarga. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa jumlah anggota keluarga yang bekerja selain kepala keluarga terbanyak berada pada interval 1-2 orang dalam rumah tangga, yaitu sebesar 54,77%. Sebesar 26,13% adalah rumah tangga yang tidak terdapat anggota keluarga yang bekerja selain kepala keluarga. Kemudian jumlah anggota keluarga yang bekerja sebanyak 3-4 orang dalam rumah tangga adalah sebesar 12%. Persentase paling sedikit adalah untuk rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga yang bekerja sebanyak 5-6 orang dan lebih dari 6 orang, yaitu sebesar 3,5%.

Jumlah anggota keluarga yang tidak bekerja atau yang menjadi tanggungan dalam rumah tangga, persentase terbesar adalah sebesar 45,5% yaitu sebanyak 1-2 orang dalam sebuah keluarga. Kemudian sebesar 40% untuk responden dengan tanggungan

sebesar 3-4 orang dalam satu keluarga dan 7,5% untuk responden dengan tanggungan sebesar 5-6 orang. Kemudian persentase terendah adalah untuk responden dengan tanggungan sebanyak lebih dari 6 orang yaitu sebesar 3,5%. Kondisi yang sama juga terjadi pada responden yang tidak memiliki tanggungan sama sekali. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 5.

Geografi responden penerima zakat terbagi ke dalam empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Kecamatan yang merupakan penerima dana zakat terbanyak adalah Kecamatan Cibungbulang yaitu sebesar 35,5%. Kemudian diikuti oleh Taman-sari, yaitu sebesar 27%. Kemudian diikuti oleh kecamatan Bogor Utara, yaitu sebesar 25%, sedangkan kepala keluarga penerima zakat paling sedikit ada di Kecamatan Ciomas yaitu dengan jumlah sebesar 12,5%, seperti yang terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Distribusi Geografi Responden

Karakteristik Demografi	Frekuensi	Persentase
Bogor Utara	50	25
Cibungbulang	71	35,5
Taman sari	54	27
Ciomas	25	12,5
	(200)	(100)

Sumber: Kuesioner, data diolah

Tabel 7
Perubahan Total Pendapatan Bulanan Responden Sebelum dan Setelah Distribusi Zakat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bogor

Kecamatan	Pendapatan Sebelum Zakat (Rp)	Pendapatan Setelah Zakat (Rp)	Jumlah Distribusi Zakat (Rp)	Persentase Zakat terhadap Total Pendapatan	Persentase Perubahan pada Total Pendapatan
Bogor Utara	49.162.426,67	86.385.000,00	5.796.333,33	6,71	11,79
Cibungbulang	46.408.000,00	110.199.398,50	14.779.333,33	13,41	31,85
Taman Sari	43.236.666,67	76.083.333,33	12.057.416,67	15,85	27,89
Ciomas	21.080.000,00	41.391.666,67	3.422.916,67	8,27	16,24
Secara Keseluruhan	159.887.093,33	314.059.398,50	36.056.000	11,48	22,55

Sumber : Kuesioner, data diolah

Tabel 8
Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1	Income Before Zakat - Income After Zakat	7,70862E5	8,34088	58978,92474	- 8,87165	- 6,54558	- 13,070	199 ,000

Sumber : Kuesioner, data diolah

Pengaruh distribusi zakat terhadap pendapatan bulanan kepala keluarga yang menerima zakat, terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7 menunjukkan adanya peningkatan pendapatan bulanan dari responden di Kabupaten Bogor setelah adanya program zakat yang didistribusikan di beberapa kelurahan. Peningkatan pendapatan ini signifikan secara statistik, seperti yang terlihat pada tabel 8.

Berdasarkan nilai *sig 2 tailed* yang < 0,05 menunjukkan ada perbedaan antara sebelum dan sesudah zakat, sehingga keberadaan zakat mempengaruhi tingkat pendapatan mustahik.

Dana zakat yang telah didistribusikan kepada mustahik berkontribusi sekitar 11,48% dari total pendapatan bulanan responden. Kondisi ini memperlihatkan bahwa orang-orang miskin kehidupannya menjadi lebih baik dengan zakat, setidaknya meningkatkan pendapatan bulanan mereka menjadi sebesar 11,48%.

Analisis Ketimpangan Pendapatan Mustahik

Distribusi pendapatan dari kepala keluarga dan total pendapatan di Kabupaten

Bogor berdasarkan metode *quantil*. Semua responden disusun berdasarkan pendapatan yang dikelompokkan. Setiap pendapatan responden diurutkan dari yang pendapatan terkecil hingga terbesar yang dibagi berdasarkan *quantil* pada jenjang pendapatan. Ada lima kelompok dari responden, sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 9.

Keterangan: q1 menunjukkan kelompok pertama atau *quantil* yang paling rendah q5 menunjukkan kelompok kelima atau *quantil* tertinggi.

Tabel 9 bahwa *quantil* pertama dari populasi penerima zakat (20% paling bawah) hanya menikmati 17% dari total pendapatan, sedangkan *quantil* tertinggi (kelompok 20% paling atas) dari populasi menikmati 24,6% dari keberadaan distribusi zakat. Kemudian ketika 40% dari populasi paling bawah menikmati 34,8% pendapatan, kelompok 40% paling atas menikmati 45,8% dari total pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan pada wilayah Bogor mengalami ketimpangan sebelum keberadaan distribusi zakat, dimana termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Tabel 9
Ukuran Pendapatan Kepala Keluarga Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat
Di Kabupaten Bogor Berdasarkan *Quantil*

Persentase Populasi	Share Persentase Dalam Total Pendapatan				Persentase dari <i>Gap</i> Ketimpangan (b-a)
	Sebelum ada Distribusi Zakat		Setelah ada Distribusi Zakat		
	<i>Quantil</i> (a)	Kumulatif <i>quantil</i>	<i>Quantil</i> (b)	Kumulatif <i>quantil</i>	
q1	0,170	0,170	0,167	0,167	-0,003
q2	0,178	0,348	0,170	0,337	-0,008
q3	0,193	0,542	0,212	0,549	0,018
q4	0,212	0,754	0,212	0,762	0,000
q5	0,246	1	0,238	1	-0,008

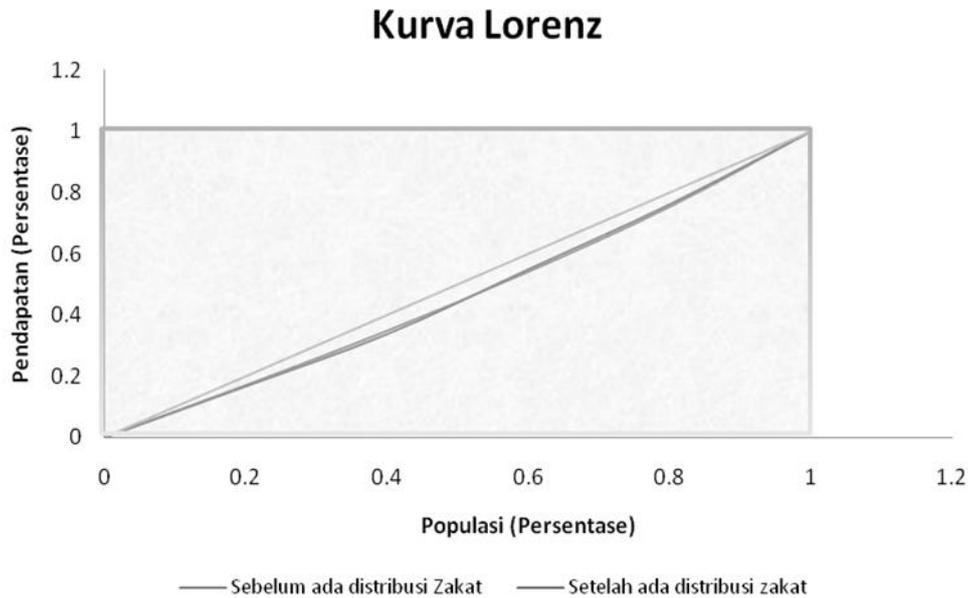
Sumber: Kuesioner, data diolah

Ketimpangan berdasarkan *World Bank* adalah fokus pada 40% dari pendapatan populasi yang paling rendah, dan kemudian kemiskinan diidentifikasi berdasarkan kriteria berikut: (i) jika kelompok 40% ini menerima kurang dari 12% dari total pendapatan, maka dikategorikan ketimpangan tinggi, (ii) jika kelompok 40% ini menerima antara 12 dan 17% dari total pendapatan, maka dikategorikan mengalami ketimpangan sedang, (iii) jika kelompok 40% ini menikmati lebih dari 17% dari total pendapatan, maka dikategorikan kedalam ketimpangan rendah.

Ketimpangan distribusi pendapatan dari 40% populasi paling bawah setelah menerima zakat sekarang menikmati 33,7% dari total pendapatan, turun sekitar 1%. Namun kondisi yang sama juga terjadi pada 40% dari populasi paling atas yang sekarang menikmati 45,1% dari total pendapatan, ada penurunan sebesar 1%. Ketimpangan yang terjadi dikategorikan dalam ketimpangan rendah. Namun 20% kelompok dalam *middle group* justru mengalami

peningkatan dalam pendapatan. Ada peningkatan sekitar 2% dari *total share* pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini. Kondisi ini terjadi karena aktivitas dari kelompok ini mampu menciptakan peningkatan pendapatan bagi mereka.

Gambar 2 terlihat bahwa setelah adanya distribusi zakat, kurva *Lorenz* bergerak sedikit menjauhi garis kesetaraan sempurna pada populasi 40% paling bawah, namun pergerakan itu relatif sangat kecil, sedangkan untuk kelompok 40% paling atas setelah ada distribusi zakat terlihat kurva *lorenz* mendekati garis kesetaraan sempurna. Namun secara keseluruhan jika dilihat dari nilai Koefisien Gini, maka terjadi perubahan dalam ketimpangan, dimana terdapat pengurangan dari Koefisien Gini dari 0,743 menjadi 0,740 setelah adanya distribusi zakat. (Nilai koefisien gini antara 0 dan 1, jika mendekati 1 berarti ketimpangan semakin besar, sebaliknya nilai koefisien gini mendekati nol berarti ketimpangan semakin kecil), seperti yang terlihat pada Tabel 10.



Gambar 2

Kurva Lorenz Sebelum dan Sesudah Ada Distribusi Zakat

Sumber: Kuesioner, data diolah

Tabel 10

Koefisien Gini Sebelum dan Sesudah ada Distribusi Zakat

Ukuran Ketimpangan	Sebelum ada Distribusi Zakat	Setelah ada Distribusi Zakat	Indeks Pengurangan
Koefisien Gini	0,0743371	0,074004	0,0003

Sumber: Kuesioner, data diolah

Tabel 11

Indeks Atkinson Sebelum dan Sesudah Ada Distribusi Zakat

Ukuran Ketimpangan	Sebelum ada Distribusi Zakat	Setelah ada Distribusi Zakat
Rata-rata pendapatan masyarakat miskin (m)	Rp 516.573,33	Rp 1.310.626,87
Rata-rata distribusi pendapatan penduduk (μ)	Rp 799.435	Rp 1.570.296,99
Koefisien gini mustahik zakat (Gp)	0,097	0,142
Tingkat kesetaraan pendapatan (Y_{EDE})	Rp 571.892	Rp 1.527.633
Indeks Atkinson (I)	0,285	0,027

Sumber: Kuesioner, data diolah

Indeks pengurangan yang terjadi adalah sebesar 0,0003. Meskipun indeks pengurangannya sangat kecil, tapi distribusi zakat telah dapat mengurangi ketimpangan diantara responden. Ini berarti membuktikan hipotesis bahwa ada perbedaan ketimpangan pendapatan dari zakat.

Nilai *Atkinson Index* untuk semua responden yang menunjukkan aspek nilai kesejahteraan sosial, terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan bulanan dari masyarakat miskin meningkat setelah ada distribusi zakat dari Rp 516.573,33 menjadi Rp 1.310.626,87.

Hal ini menunjukkan keberadaan zakat meningkatkan distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin. Tingkat kesetaraan pendapatan menunjukkan tingkat pendapatan perkepala rumah tangga yang menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang sama bila pendapatan didistribusikan secara merata.

Kesejahteraan sosial yang sama itu akan terwujud jika pendapatan didistribusikan secara merata pada setiap rumah tangga. Untuk setiap kepala rumah tangga akan mendapat Rp 571.892 per rumah tangga, namun kondisi yang terjadi pada rata-rata distribusi pendapatan penduduk adalah sebesar Rp 799.435. Dengan kata lain untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang sama membutuhkan 71,5% dari pendapatan yang ada saat ini. Sementara 28,5% adalah pendapatan yang hilang (*income loss*) yang nilainya sebesar Rp 227.839. Nilai ini didapatkan dari pengalian *atkinson index* (0,082) dengan rata-rata distribusi pendapatan penduduk (Rp 799.435). Hal ini terjadi dikarenakan ketimpangan dari distribusi yang ada.

Nilai Indeks *Atkinson* meningkat jadi 0,027 setelah didistribusikan zakat kepada mustahik. Jika pendapatan didistribusikan secara merata maka setiap rumah tangga saat ini akan mendapat Rp. 1.527.633. Namun rata-rata distribusi pendapatan penduduk yang terjadi adalah sebesar Rp 1.570.296,99. Pendapatan yang hilang (*income loss*) yang disebabkan oleh ketimpangan sekarang meningkat sebesar Rp 42.664,287. Nilai ini didapatkan dari pengalian *atkinson index* (0,027) dengan rata-rata distribusi pendapatan penduduk (Rp 1.570.296,99). Penurunan nilai *atkinson index* sebesar 0,257 dari 0,285 menjadi 0,027 tampaknya mengurangi kesejahteraan sosial yang hilang.

Analisis Kemiskinan Mustahik Di Kabupaten Bogor

Indeks kemiskinan rumah tangga mustahik Kabupaten Bogor terlihat dalam Tabel 12,

Tabel 12 menunjukkan masalah kemiskinan yang diukur dengan *Headcount ratio* (H) yang menunjukkan angka cukup besar yaitu sebesar 0,620. Angka tersebut menunjukkan bahwa 62% dari populasi penerima zakat itu hidup di bawah garis kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa penerima zakat yang dominan adalah masyarakat miskin. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemilihan mustahik oleh Baytul Mal dan Baytul Ikhtiar sudah memenuhi aspek syariah.

Keberadaan zakat yang didistribusikan ke mustahik telah mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 44%. Hal ini dapat dilihat dari nilai *headcount ratio* yang menurun dari 62% sebelum ada distribusi zakat menjadi 18% setelah ada distribusi zakat. Dengan kondisi ini maka terjawablah pertanyaan penelitian kedua bahwa dana zakat yang didistribusikan kepada rumah tangga mustahik dapat mengurangi jumlah mustahik yang hidup dibawah garis kemiskinan. Besarnya nilai penurunan tingkat kemiskinan mustahik ini, dapat disebabkan oleh pola pembinaan yang dilakukan tiap pekan oleh tim dari *Baytul* ikhtiar terhadap mustahik binaannya.

Di samping itu ada nilai-nilai normatif juga yang ditanamkan pada setiap mustahik binaannya. Nilai-nilai *normative* tersebut seperti nilai kejujuran, tanggung jawab dan yang paling penting bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan kelak dihadapan Allah SWT. Hal ini tertuang dalam ikrar yang selalu diucapkan pada setiap pertemuan pekanan yang diadakan. Pola pembinaan seperti inilah yang berpengaruh terhadap kondisi mustahik, baik dari aspek spiritualitas maupun etos kerja untuk merubah kondisinya menjadi lebih baik.

Tingkat kesenjangan kemiskinan yang diukur dengan *poverty gap index* (P1), sebagaimana yang terlihat pada Tabel 12 menunjukkan hasil yang cukup memberi harapan. Setelah adanya distribusi zakat, rata-rata kesenjangan kemiskinan antara mustahik zakat dapat dikurangi dari Rp

322.534,67 menjadi Rp 234.819. Dengan demikian telah terjadi pengurangan sebesar Rp 87.716. Hasil ini menjawab pertanyaan

penelitian yang ketiga bahwa keberadaan distribusi zakat dapat mengurangi tingkat kesenjangan kemiskinan.

Tabel 12
Indeks Kemiskinan Mustahik Kabupaten Bogor

Ukuran Kemiskinan	Sebelum Distribusi Zakat	Setelah Distribusi Zakat
H	0,620	0,180
P1	Rp 322.534,67	Rp 234.819
I	0,238	0,050
P2	0,237	0,057
P3	0,124	0,023

Sumber: Kuesioner, data diolah

dimana,

H	: <i>Headcount ratio</i>	P2	: <i>Sen index</i>
P1	: <i>Poverty-gap ratio</i>	P3	: <i>FGT index</i>
I	: <i>Income-gap ratio</i>		

Kedalaman kemiskinan yang diukur dengan *income gap index* juga menunjukkan hal yang positif. Berdasarkan Tabel 12 tingkat kedalaman kemiskinan dapat dikurangi dari 0,238 menjadi 0,05. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan kedalaman kemiskinan sebesar 18,8%. Hal ini juga dapat diartikan bahwa jarak rata-rata yang memberi batasan antara penerima zakat yang berada dibawah garis kemiskinan dengan titik sentuh garis kemiskinan berkurang. Kondisi ini telah menjawab pertanyaan penelitian keempat.

Tingkat keparahan kemiskinan diketahui dari nilai *sen index* (P2) dan *FGT index* (P3). Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa terdapat pengurangan dari nilai *sen index* dan *FGT index* antara sebelum ada distribusi zakat dengan setelah terdapat distribusi zakat. *Sen index* menunjukkan pengurangan sebesar 18%, sedangkan *FGT index* menunjukkan pengurangan 10,1%. Hal ini menunjukkan adanya efek positif dari zakat terhadap pengurangan tingkat keparahan kemiskinan. Hasil ini menjawab pertanyaan penelitian yang kelima bahwa dana zakat yang didistribusikan memiliki dampak positif terhadap pengurangan tingkat keparahan kemiskinan. Temuan empiris

ini membuktikan hipotesis tentang efek positif dari zakat terhadap pengurangan kemiskinan dengan melihat perbedaan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah menerima dana zakat. Program zakat yang telah dijalankan oleh lembaga zakat dapat mengurangi insiden kemiskinan, kesenjangan kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Temuan ini juga sejalan dengan Patmawati (2006) yang menemukan kesimpulan yang sama pada kasus Selangor, Malaysia dan Beik (2010) untuk kasus DKI Jakarta. Untuk itu kedepan pengumpulan dan pendistribusian zakat harus menjadi prioritas yang harus dikembangkan oleh negara, karena secara empiris zakat telah terbukti sebagai *tool* dalam pengurangan kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan Kabupaten Bogor dapat dikurangi rata-rata 0,3% setelah keberadaan zakat. Keberadaan zakat membuat kondisi *social welfare* menjadi lebih baik. Terdapat sekitar 25,7% penurunan dari *income loss* setelah keberadaan zakat. Keberadaan distribusi

zakat telah menurunkan jumlah orang miskin di Kabupaten Bogor sebesar 44% dilihat dari nilai *headcount ratio*. Perbandingan nilai *poverty gap index* antara sebelum dan sesudah zakat, menunjukkan zakat memberikan pengaruh yang baik terhadap pengurangan kesenjangan kemiskinan sebesar 18,8%. Keberadaan zakat telah menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 18,8% dilihat dari penurunan nilai *income gap ratio*.

Hasil penelitian juga menunjukkan keberadaan dari distribusi zakat telah menurunkan tingkat keparahan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *sen index* dan *FGT index*. Untuk nilai *sen index* naik sebesar 18% dan nilai *FGT index* naik sebesar 10%. Hal ini mengindikasikan zakat mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan yang ada pada responden.

Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah diharapkan penelitian selanjutnya mampu mengembangkan model pengukuran yang lebih baik, seperti dalam standar pengukuran kemiskinan bisa menggunakan standar model Islam, seperti nisab atau *had al kifayah*. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas area penelitian pada daerah lain di Indonesia, terutama pada daerah yang secara kultur keagamaan lebih bagus dan sudah mengaplikasikan perda zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. D. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press. Jakarta.

Beik, I. S. 2010. *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality in the Province of DKI Jakarta, Indonesia: Case Study of the Government Board of Zakat and Dhompot Dhuafa Republika*. International Islamic University Malaysia. Kuala Lumpur.

Chapra, U. 2006. *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy*. A.M ed. *Development Issue in Islam*. International

Islamic University. Kuala Lumpur.

Dompot Dhuafa. 2010. *Panduan Zakat Praktis*. Republika. Jakarta.

Hartoyo, S. dan N. Purnamasari. 2010. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Zakat: Studi Kasus di Garut. *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia* 29 Juli 2010.

Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ). 2011. *Indonesia Zakat and Development Report 2011: Kajian Empirik Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Dhompot Dhuafa. Jakarta.

Kahf, M. 1995. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Cetakan ke-1. Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.

Mannan, A. 2000. *Effect of Zakat Assesment and Collection on the Redistribution of Income Contemporerary Muslim Countries*. IRTI-IDB. Jeddah.

Panji, I. 2001. *An Analysis towards Urban Poverty Alleviation Program in Indonesia*. Faculty of the School Policy, Planning and Development. University of Southern California. California.

Patmawati. 2006. *Economic Role Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor*. University Putra Malaya. Selangor.

Pramanik, A. H. 1993. *Development and Distribution in Islam*. Pelanduk Publications. Petaling Jaya.

Sadeq, A. M. dan A. Ghazali. 1992. *Reading in Islamic Economic Thought*. Longman. Malaysia.

Rahayu, S., K. Sondi, dan R. Adang. 2000. *Analisa Pemerataan Pendapatan Usaha Ternak Sapi Perah Rakyat (Survei pada Peternakan Sapi Perah Rakyat di KUD Mitra Yasa Kabupaten Tasikmalaya)*. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Sumedang.

Robb, C. M. 2002. Can the Poor Influence Policy? Participatory Poverty Assessments in the Developing World. *Paperback*. World Bank.

Shirazi, N. S. 1994. *An Analysis of Pakistan's Poverty Problem and Its Allevation through Infaq*. International Islamic University. Islamabad.